

KANTOR GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Oleh : Desti Rahmiati, Bambang Setioko, Gagoek Hardiman

Kota Palembang dalam 5 tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang begitu pesat, terlihatnya dari maraknya pertumbuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kota, dan roda perekonomian yang terus menggeliat. Berdasarkan fenomena tersebut, potensi kota Palembang untuk berkembang sangat besar. Hal inilah yang mendasari penetapan suatu visi strategis, yaitu Palembang sebagai kota bertaraf internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah provinsi Sumatera Selatan berencana untuk merelokasi Kantor Gubernur Sumatera Selatan sebagai salah satu program pengembangan kawasan Jakabaring sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kota Palembang.

Kajian diawali dengan penelusuran mengenai gedung pemerintahan, filosofi struktur pemerintahan provinsi, standar-standar dan kebijakan mengenai tata ruang dalam kantor Gubernur, studi banding beberapa Kantor Gubernur di Provinsi Jawa. Dilakukan juga tinjauan mengenai lokasi kantor Gubernur Sumatera Selatan dan pembahasan konsep perancangan dengan penekanan desain Arsitektur Neo-Vernakular. Tapak yang digunakan adalah lahan kosong yang diperuntukkan sebagai zona pemerintahan. Selain itu, dibahas pula mengenai massa dan tata ruang, penampilan bangunan, struktur serta utilitas yang diterapkan dalam perancangan "Kantor Gubernur Sumatera Selatan".

Konsep perancangan ditekankan pada desain Arsitektur Neo-Vernakular, yaitu langgam arsitektur yang memunculkan kembali unsur tradisional setempat kedalam bangunan modern. Penekanan desain arsitektur neo-vernakular diharapkan dapat menghasilkan suatu rancangan kantor pemerintah provinsi yang sesuai standar, yang juga mampu mencerminkan eksistensi dari berdirinya lembaga pemerintahan daerah dan sebagai lambang kebanggaan daerah. Untuk bangunan kantor Gubernur Sumatera Selatan, dirancang dengan konsep denah berbentuk simetris yang mengesankan kesan megah pada bangunan.

Kata Kunci : Kantor, Gubernur, Sumatera Selatan, Neo Vernakular

1. LATAR BELAKANG

Pesatnya pertumbuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kota, dan roda perekonomian yang terus menggeliat mencerminkan adanya kemajuan yang begitu pesat di kota Palembang. Berdasarkan fenomena tersebut, Pemerintah Kota Palembang melihat potensi yang sangat besar bagi kota Palembang untuk berkembang dan mencanangkan suatu visi strategis yaitu "Palembang sebagai kota bertaraf internasional". Dalam rangka mewujudkan visi Kota Palembang sebagai kota bertaraf internasional, maka pemerintah provinsi Sumatera Selatan sudah merencanakan beberapa program yang salah satunya program pengembangan kawasan Jakabaring sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kota Palembang dengan merelokasi kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mengingat fungsi gedung pemerintahan yang satu ini sangat penting, yaitu kantor gubernur merupakan kantor pusat pemerintahan ibukota provinsi. Kantor Gubernur Sumatera Selatan terletak di ibukota Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin mengatakan pembangunan kantor gubernur baru mendesak dilakukan, mengingat kantor lama yang letaknya di zona padat dan tak layak lagi sebagai pusat perkantoran. (sumber : Sriwijaya Post – Minggu, 14 Februari 2010). Sementara kantor gubernur yang lama

direncanakan untuk area bisnis dengan system tukar guling atau sewa dengan pihak ketiga. Bila dilihat secara keseluruhan, kantor gubernur sumatera selatan yang lama kurang memperlihatkan kejelasan sirkulasi dan tidak mempunyai kesatuan bentuk yang mempresentasikan kedudukan pemerintahan provinsi yang akan berdampak pada menurunnya kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut mendorong perlunya penataan kembali kantor gubernur Sumatera Selatan. Perancangan kantor Gubernur Sumatera Selatan ini menggunakan penekanan desain arsitektur neo-vernakular yang diharapkan dapat menghasilkan suatu rancangan kantor pemerintah provinsi sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar, kantor pemerintah provinsi yang mencerminkan eksistensi dari berdirinya lembaga pemerintahan daerah dan sebagai lambang kebanggaan daerah.

2. RUMUSAN MASALAH

- Perlu dilakukannya perancangan kembali kantor Gubernur Sumatera Selatan sebagai upaya relokasi dari zona padat dan tak

layak ke zona pemerintahan provinsi yang baru.

- Diperlukan suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan provinsi dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar.
- Diperlukan suatu desain kantor gubernur yang dapat mencerminkan eksistensi dari berdirinya lembaga pemerintahan daerah dan sebagai lambang kebanggaan daerah.
- Kebijakan penentuan lokasi rancangan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang 2004-2014 mempengaruhi desain kantor Gubernur Sumatera Selatan.

3. TUJUAN

Tujuan dari “Perancangan Kantor Gubernur Sumatera Selatan” adalah memerancang kantor gubernur dengan konsep-konsep khusus dan berdasarkan pada standar-standar sarana dan prasarana kerja, yang diharapkan dapat menjadi lingkungan kerja yang baik sebagai upaya peningkatan motivasi kerja dan menciptakan suatu bentuk kinerja yang efisien dan terpadu serta dapat menjadi lambang kebanggaan daerah.

4. METODOLOGI

Kajian diawali dengan penelusuran mengenai gedung pemerintahan, filosofi struktur pemerintahan provinsi, standar-standar dan kebijakan mengenai tata ruang dalam kantor Gubernur, studi banding beberapa Kantor Gubernur di Provinsi Jawa. Dilakukan juga tinjauan mengenai lokasi kantor Gubernur Sumatera Selatan dan pembahasan konsep perancangan dengan penekanan desain Arsitektur Neo-Vernakular. Pemilihan tapak dilakukan dengan menggunakan matriks pembobotan terhadap 3 alternatif lokasi. Tapak yang digunakan adalah lahan kosong yang diperuntukkan sebagai zona pemerintahan. Selain itu, dibahas pula mengenai massa dan tata ruang, penampilan bangunan, struktur serta utilitas yang diterapkan dalam perancangan “Kantor Gubernur Sumatera Selatan”.

5. KAJIAN PUSTAKA

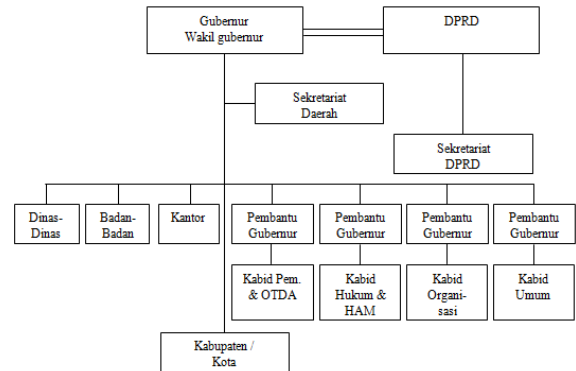
5.1 Tinjauan Pemerintah Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2, definisi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam pemerintahan provinsi terdapat dua lembaga pemerintahan, yaitu kepala daerah (Gubernur) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, gubernur bertanggungjawab langsung kepada DPRD Provinsi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Provinsi

Sumber : <http://tugino230171.wordpress.com>

5.2 Tinjauan Kantor Gubernur

Kantor gubernur merupakan salah satu bangunan institusi yang secara mutlak dimiliki oleh Negara. Kantor gubernur memiliki fungsi sebagai suatu tempat yang mampu mengakomodasi kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh Gubernur dan wakilnya beserta sekretariat daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat.

5.3 Karakter Bangunan Kantor Pemerintahan

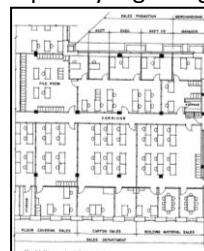
Karakter bangunan pemerintahan sebagai *public building* antara lain :

- Sistem pelayanan administrasi kota yang lebih terbuka;
- Kemudahan pencapaian dalam *public entrance*;
- Kenyamanan dalam pelayanan;
- Kemudahan mengenali bangunan pemerintahan sebagai *public building*, yang memenuhi karakter dan identitas, tidak terlepas dari lingkungan, serta dekat masyarakat.

5.4 Penataan Ruang Kantor

Berikut adalah prinsip perencanaan tata ruang kantor :

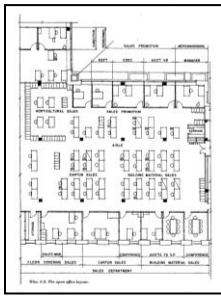
- Tata ruang kantor konvensional (terpisah) yaitu ruangan kerja berupa kamar-kamar terpisah yang dibagi berdasarkan satuan kerja.



Gambar 2. Tata ruang kantor konvensional

Sumber : Kennet H. Rippen, 1960, *Office space administration*

- Tata ruang kantor terbuka yaitu satu ruang besar terbuka yang terbagi-bagi menjadi beberapa ruangan kerja.



Gambar 3. Tata ruang kantor terbuka
 Sumber : Kenneth H. Rippen, 1960, *Office space administration*



Gambar 4. Tampak kantor gubernur Sumatera Selatan
 Sumber : Dokumentasi Penyusun

Kantor gubernur Sumatera Selatan merupakan bangunan massa banyak dengan ketinggian 1-3 lantai yang berlokasi di pusat kota dan dapat dijangkau dengan mudah baik oleh transportasi pribadi maupun transportasi umum.

5.5 Kriteria Pemilihan Lokasi Untuk Perkantoran Pemerintahan

Kriteria pemilihan lokasi untuk kegiatan pemerintahan dan perkantoran dibedakan berdasarkan hirarki perkantoran pemerintahan serta jangkauan pelayanan kegiatan perkantoran pemerintahan. Dilihat dari aspek ketataprajaan di setiap kota, terdapat dua fungsi pemerrintahan, yaitu sebagai pusat kegiatan pemerintahan provinsi dan fungsi sebagai pusat wilayah administrasi kota. Untuk penentuan lokasi perkantoran pemerintahan harus disesuaikan dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di masing-masing kota.



Gambar 5. Interior kantor gubernur Sumatera Selatan
 Sumber : Dokumentasi Penyusun

Untuk desain tata ruang kantor menggunakan tata ruang konvensional yang berupa ruang-ruang terpisah berdasar satuan kerja. Ruang kerja yang terpisah-pisah ini dihubungkan dengan koridor yang berpola *double-loaded corridor*. Koridor dengan bentuk seperti ini masih memungkinkan cahaya matahari untuk masuk ke dalam ruangan hanya dari satu sisi. Sedangkan pada area koridornya sendiri sangat membutuhkan pencahayaan buatan karena tidak terkena cahaya matahari.

5.6 Kriteria Pemilihan Lokasi Untuk Perkantoran Pemerintahan

Arsitektur neo-vernakular merupakan arsitektur modern yang berpijak pada nilai-nilai kehidupan masyarakat tradisional setempat. Pembauran terhadap nilai-nilai kehidupan yang dimaksud adalah penyesuaian tampilan arsitektur dengan ciri lingkungan tanpa meniru ciri tersebut secara keseluruhan. Terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan arsitektur neo-vernakular, yaitu :

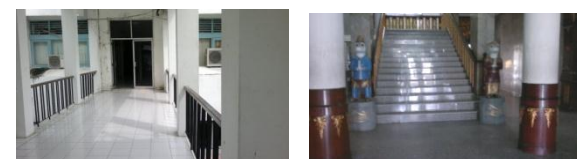
1. Aspek Fisik
 Aspek fisik adalah suatu bentuk tampilan bangunan yang dapat dilihat mata dan mempunyai wujud dan bentuk tertentu, meliputi bentuk, bahan dan konstruksi bangunan.
2. Aspek Non Fisik
 Aspek non fisik dalam arsitektur neo-vernakular meliputi kosmologi/religi dan konsep simbolis.



Gambar 6. Aspek arsitektural pada interior kantor gubernur Sumatera Selatan
 Sumber : Dokumentasi Penyusun

Dilihat dari segi arsitektur bangunan terlihat penerapan arsitektur vernakular sebagai respon terhadap iklim setempat, yaitu penggunaan atap limas, tritisan yang lebar dan ornamen-ornamen khas yang merupakan ciri kebudayaan Sumatera Selatan pada beberapa bagian interior bangunan. Untuk struktur bangunan, kantor gubernur Sumatera Selatan menerapkan struktur grid dengan jarak modul kolom yang teratur. Struktur dengan grid mengakibatkan penataan ruang membentuk pola linear yang panjang sehingga terasanya kesan monoton saat memasuki gedung kantor gubernur tersebut.

6. STUDI LAPANGAN Kantor Gubernur Sumatera Selatan



Gambar 7. Sistem utilitas bangunan pada kantor gubernur Sumatera Selatan
 Sumber : Dokumentasi Penyusun

Sedangkan utilitas bangunan yang ada pada bangunan ini meliputi penggunaan AC *compact* dan tangga sebagai satu-satunya system transportasi vertikal. Dikarenakan tangga merupakan satu-satunya transportasi vertikal didalam gedung membuat kinerja para pegawai sedikit menurun karena merasa agak malas untuk naik-turun tangga yang memiliki cukup banyak anak tangga.

7. STUDI BANDING

7.1 Kantor Gubernur Jawa Tengah



Gambar 8. Tampak kantor gubernur Jawa Tengah
Sumber : Dokumentasi Penyusun

Kantor gubernur Jawa Tengah merupakan bangunan tunggal dengan ketinggian 12 lantai yang berlokasi di pusat kota dan dapat dijangkau dengan mudah baik oleh transportasi pribadi maupun transportasi umum.



Gambar 9. interior kantor gubernur Jawa Tengah
Sumber : Dokumentasi Penyusun

Untuk desain tata ruang kantor menggunakan tata ruang konvensional yang berupa ruang-ruang terpisah berdasar satuan kerja. Kenyamanan termal di ruang ini masih belum baik, karena di bagian yang berada di dekat jendela merasakan panas yang sedikit lebih banyak karena terkena sinar matahari.

Koridor pada gedung kantor gubernur Jawa Tengah merupakan koridor yang mengelilingi inti bangunan (*core*) atau yang sering disebut *point block system corridor* dan memiliki lebar yang cukup untuk menampung sirkulasi pengguna secara 2 arah. Area koridor ini sangat membutuhkan pencahayaan buatan karena tidak terkena cahaya matahari.

Gedung kantor gubernur Jawa Tengah merupakan gedung tertinggi di kota Semarang. Tampilan bangunannya megah dan kokoh. Fasade bangunan menonjolkan 2 bagian pada massa bangunan utama secara merata. Bentuk atap perisai seperti ini menyesuaikan iklim setempat yaitu sinar matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang cukup tinggi. Bentuk gedung kantor gubernur Jawa Tengah menggunakan pola geometris dan sistem grid pada struktur bangunan. Hal ini terlihat dari perletakan kolom-kolom bangunan yang teratur dengan jarak

modul kolom sebesar 6 m. Inti bangunan/*core* terletak di tengah-tengah massa bangunan utama.



Gambar 10. Sistem mekanikal elektrikal pada kantor gubernur Jawa Tengah
Sumber : Dokumentasi Penyusun

Sistem mekanikal elektrikal di dalam gedung kantor gubernur Jawa Tengah sudah sangat baik, dilihat dari nilai efektif dan efisien dalam penggunaan sistem-sistem mekanikal elektrikal tersebut. Sistem mekanikal elektrikal yang ada pada gedung kantor gubernur Jawa Tengah meliputi lift dan tangga sebagai alat transportasi vertikal, *hydrant* tabung dan *sprinkler* sebagai alat pemadam kebakaran, dan AC *ducting split* sebagai sistem penghawaan buatan.

7.2 Kantor Gubernur D.I. Yogyakarta



Gambar 11. Tampak kompleks kepatihan danurejan
Sumber : Dokumentasi Penyusun

Kantor gubernur DIY merupakan bagian dari kawasan pemerintah provinsi DIY. Penataan sirkulasi dan *landscape* di kawasan ini sudah teratur, akan tetapi *signages* masing-masing bangunan belum tersedia sehingga akan menyulitkan pengunjung dalam mencapai bangunan tujuan. Desain tata ruang kantor berupa tata ruang konvensional. Ruang kerja yang terpisah-pisah ini dihubungkan dengan koridor yang berpola *single-loaded corridor* dan *double-loaded corridor*. Koridor dengan bentuk seperti ini masih memungkinkan cahaya matahari untuk masuk ke dalam ruangan hanya dari satu sisi. Sedangkan pada area koridornya sendiri sangat membutuhkan pencahayaan buatan karena tidak terkena cahaya matahari.



Gambar 12. Koridor pada kantor gubernur DIY
Sumber : Dokumentasi Penyusun

Arsitektur tradisional Jawa sangat terasa di kawasan ini, dapat dilihat dari bentuk atap, pintu dan jendela serta adanya pendopo.



Gambar 13. Sistem mekanikal elektrikal pada kantor gubernur D.I. Yogyakarta

Sumber : Dokumentasi Penyusun

Sistem mekanikal elektrikal yang ada meliputi tangga sebagai alat transportasi vertical, hydrant sebagai pemadam kebakaran, AC compact sebagai sistem penghawaan buatan yang secara keseluruhan dinilai sudah baik.

8. KAJIAN LOKASI

Penentuan lokasi perancangan kantor gubernur sumatera selatan harus menyesuaikan kebijakan peruntukan lahan bagi pemerintahan dari peraturan setempat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang 2004-2014, rencana kawasan wilayah pengembangan Jakabaring adalah sebagai kawasan pengembangan baru untuk distribusi kegiatan, keramaian dan perumahan dari pusat kota Palembang. Selain itu, kawasan ini direncanakan sebagai kawasan distribusi skala regional dan kota. Adapun rencana pemanfaatan kawasan ini adalah sebagai kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana olahraga serta rawa perlindungan.



Gambar 14. Rencana Peruntukkan Lahan Jakabaring Palembang

Sumber : BAPPEDA Kota Palembang

Terdapat lahan seluas ± 80 Ha di wilayah pengembangan Jakabaring yang direncanakan oleh Pemerintah untuk kawasan perkantoran. Lahan

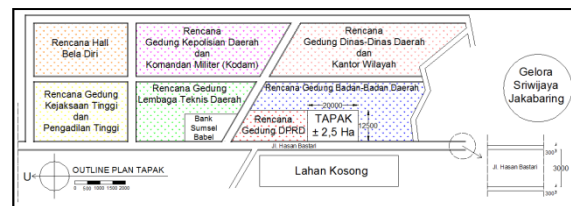
seluas ± 80 Ha tersebut terbagi menjadi 2 bagian yaitu ± 30 Ha untuk kawasan perkantoran dan ± 50 Ha untuk kawasan pusat pemerintahan.



Gambar 15. Tapak terpilih

Sumber : google earth dan dokumentasi penyusun

Tapak terpilih berada di Jl. Hasan Bastari Jakabaring Palembang yang merupakan jalan Arteri Sekunder. Karena tapak yang tersedia sangat luas yaitu ± 80 Ha, maka diperlukan *outline plan* tapak untuk menentukan lokasi dan ukuran tapak Kantor Gubernur Sumatera Selatan.



Gambar 16. Outline plan tapak

Sumber : analisa penyusun

Dari hasil analisa terhadap *outline plan* tapak tersebut, didapat luas tapak sebesar ± 2,5 Ha dengan batas-batas tapak sebagai berikut :

- Utara : Lahan kosong, Bank Sumselbabel
- Timur : Lahan kosong, Gelora Sriwijaya Jakabaring
- Selatan : Venue Jakabaring
- Barat : Lahan kosong

Sedangkan peraturan bangunan setempat yang berlaku pada lokasi tapak antara lain :

- KDB = 60%
- KLB = 2,4
- GSB = 15 m

Batas maksimal ketinggian bangunan = 15 lantai.

9. PERANCANGAN KANTOR GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Poin-poin yang ada dalam perancangan “Kantor Gubernur Sumatera Selatan” antara lain :

- Pencapaian

Diakses melalui Jalan Hasan Bastari, jalan arteri sekunder, lebar 30 meter, merupakan daerah yang cukup padat lalu lintas kendaraan.

- Sirkulasi
Sirkulasi kendaraan masuk ke tapak melalui *main entrance* pada sisi jalan Hasan Bastari Jakabaring, sedangkan *side entrance* terletak di Jalan lingkungan bagian belakang tapak. Untuk sirkulasi kedalam bangunan sendiri dibagi menjadi 2 bagian yaitu dibagian depan bangunan yang merupakan titik di garis sumbu perancangan bangunan, sedangkan pintu lainnya terletak di bagian belakang yang diperuntukkan bagi karyawan kantor.

- Tata massa
Penataan massa bangunan kantor gubernur sumater selatan ini didasarkan pada pola simetris dengan garis sumbu yang sangat jelas. Pola simetris ini diterapkan agar bangunan kantor gubernur sumatera selatan dapat terkesan megah dan kokoh. Dimana bagian bangunan yang terkena atau garis sumbu merupakan *catchment point* atau mempunyai nilai paling tinggi dibandingkan dengan bangunan-bangunan sayap yang mengapitnya.
- Pendekatan Desain Kantor Gubernur Sumatera Selatan

Penekanan desain yang diambil adalah Arsitektur neo-vernakular. Penerapan arsitektur neo-vernakular dapat diwujudkan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Penampilan bangunan yang megah dan monumental sebagai ciri dari suatu kekuasaan pemerintahan.
- Penerapan atap dengan tritisan yang lebar sebagai tanggapan dari iklim setempat (iklim tropis). Tritisan yang lebar ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan, dapat mengurangi udara panas di siang hari dan tidak terlalu dingin pada saat malam hari.
- Penerapan sentuhan warna cat kuning keemasan sebagai ciri khas kota Palembang, agar bangunan kantor gubernur sumatera selatan dapat member kedekatan terhadap lingkungan sekitar.

Dari analisa kebutuhan ruang, diperoleh perhitungan terhadap luasan perancangan, yaitu sebagai berikut :

- Luasan perancangan
 - Luas lantai dasar bangunan = **10.427 m²**
 - Luas tapak minimal yang dibutuhkan :

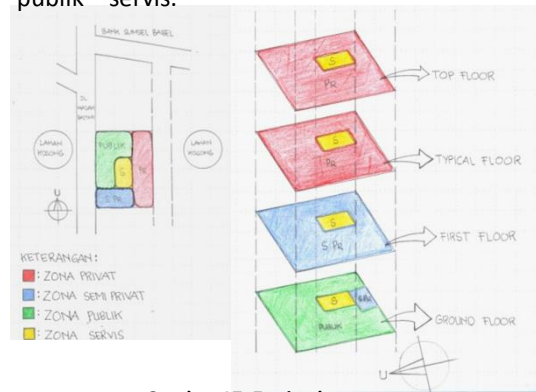
$$= \frac{1}{KDB} \times 10427 \text{ m}^2$$

$$= \frac{100}{60} \times 10427 \text{ m}^2 = \mathbf{17.380 \text{ m}^2}$$

Sedangkan untuk perancangan tata masa, konsep bentuk, penampilan bangunan, serta struktur dan utilitasnya, dirancang sebagai berikut :

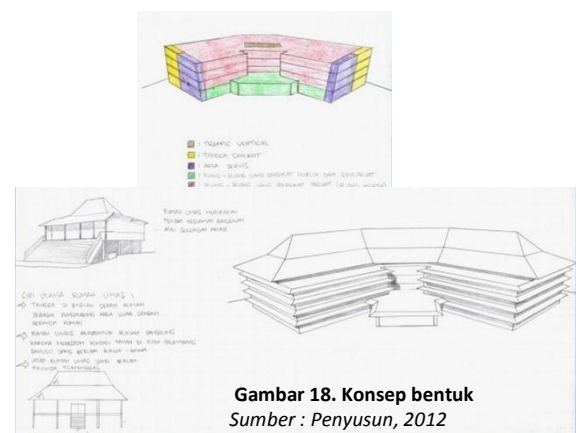
- Tata massa dan ruang bangunan
Penataan massa bangunan dirancang dengan pola simetris dengan garis axis yang jelas. Zoning

dibagi berdasarkan sifat privat – semiprivat – publik – servis.



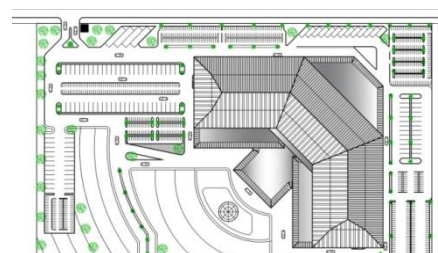
Gambar 17. Zoning bangunan
Sumber : Penyusun, 2012

Kantor Gubernur Sumatera Selatan merupakan gedung pemerintahan yang harus terkesan megah, maka dari itu konsep bentuk yang diambil adalah bentuk geometris persegi dan bentuk keseluruhan memperlihatkan bentuk yang simetris. Untuk perletakan dan orientasi bangunan didapat dari analisa tapak dan *catchment point* yang dianalisa dari arah pusat kota. Dimana bagian bangunan yang terkena garis sumbu mempunyai nilai (*value*) yang paling tinggi dan digunakan untuk kegiatan utama. Untuk atap bangunan, mengadopsi atap limas yang digunakan pada rumah adat sumatera selatan dengan 2 besaran sudut yang berbeda.

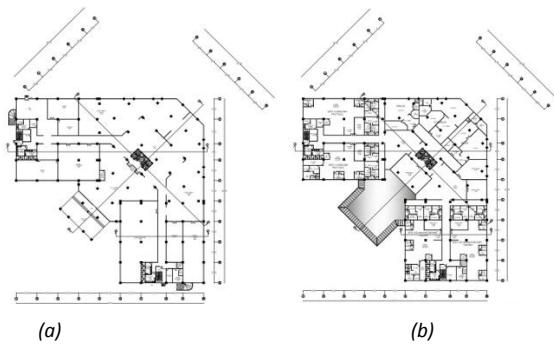


Gambar 18. Konsep bentuk
Sumber : Penyusun, 2012

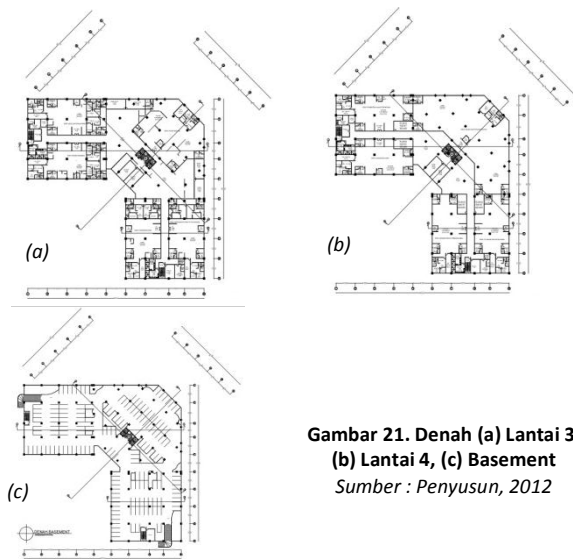
- Penampilan bangunan
Sebagai bangunan pemerintahan yang berupaya menunjukkan kekuasaan pemerintahan provinsi maka harus terlihat megah, modern untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap menyatu dan memiliki kedekatan dengan masyarakat setempat.



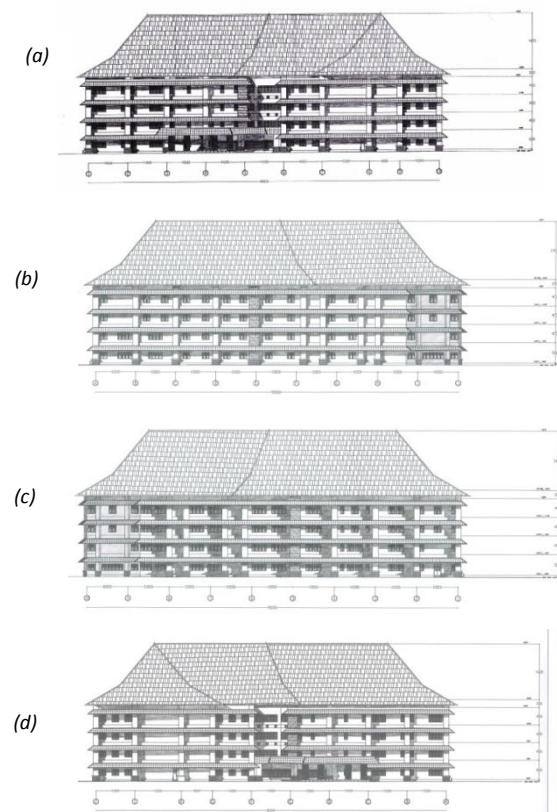
Gambar 19. Situasi
Sumber : Penyusun, 2012



Gambar 20. Denah (a) Lantai 1, (b) Lantai 2
Sumber : Penyusun, 2012



Gambar 21. Denah (a) Lantai 3, (b) Lantai 4, (c) Basement
Sumber : Penyusun, 2012



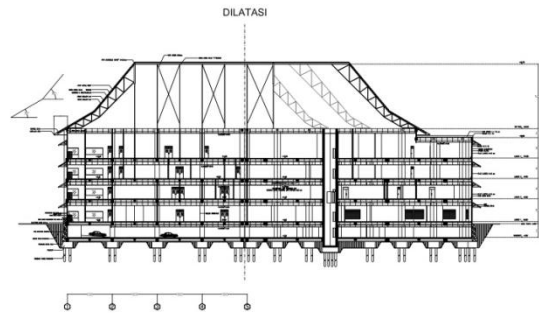
Gambar 22. Tampak (a) Depan, (b) Samping kiri, (c) Belakang, (d) Samping kanan
Sumber: Penyusun, 2012



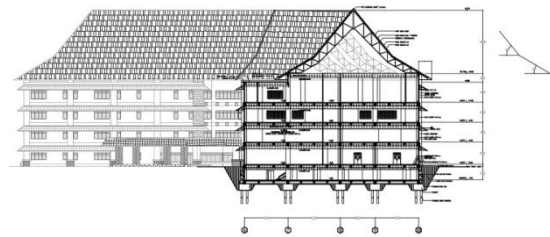
Gambar 23. Perspektif bangunan
Sumber : Penyusun, 2012

▪ Struktur

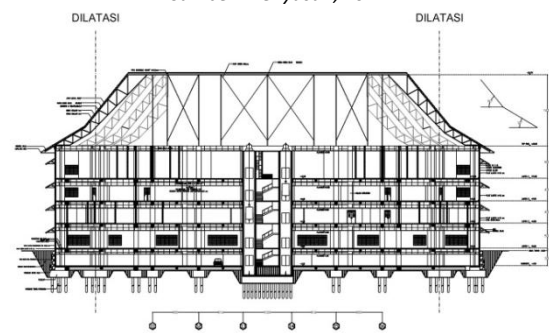
Struktur bangunan kantor gubernur Sumatera Selatan terdiri dari *sub structure* yaitu menggunakan pondasi tiang pancang dan *upper structure* meliputi struktur rangka kaki yang terdiri dari struktur grid dan struktur bentang lebar, struktur lantai beton, struktur rangka atap baja, dan struktur dinding geser (*shear wall*) sebagai perkuatan struktur. Terdapat beberapa bagian bangunan yang menggunakan dilatasi.



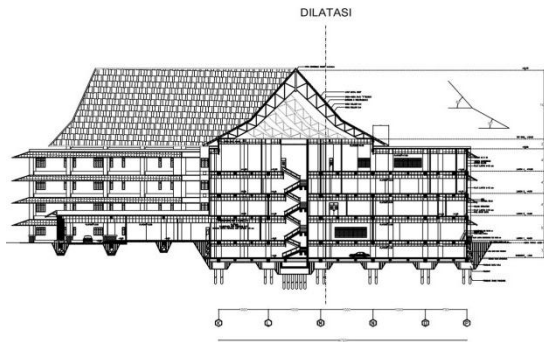
Gambar 24. Potongan 1-1
Sumber : Penyusun, 2012



Gambar 25. Potongan 2-2
Sumber : Penyusun, 2012



Gambar 26. Potongan 3-3
Sumber : Penulis, 2012



Gambar 27. Potongan 4-4
Sumber : Penulis, 2012

▪ Utilitas

- *Sistem Penerangan*
Penggunaan cahaya matahari melalui bukaan-bukaan dinding (jendela), sedangkan penggunaan penerangan buatan digunakan pada ruangan yang membutuhkan tingkat cahaya tertentu dan tempat yang tidak terkena cahaya matahari meliputi ruang rapat dan koridor.
- *Sistem Pengkondisian Udara*
Orientasi bangunan arah utara-selatan. Penggunaan AC *ducting split* di dalam bangunan agar dapat mengefisienkan energi dan penggunaan *exhaust* pada ruang mekanikal, tangga darurat dan lantai basement.
- *Sistem Jaringan Listrik*
Listrik yang digunakan dalam bangunan bersumber dari PLN. Listrik tersebut akan diterima oleh trafo penstabil tegangan, kemudian dialirkan ke *main distribution panel* yang diteruskan ke *sub distribution panel* yang akan mengalirkan listrik ke tiap-tiap peralatan listrik. Penyediaan genset sebagai sumber listrik cadangan.
- *Sistem Penyediaan dan Distribusi Air Bersih*
Sumber air bersih berasal dari PDAM Tirta Musi dan pendistribusiannya di dalam bangunan menggunakan *down feed system*. Air bersih dari PDAM disalurkan dan ditampung ke dalam *ground reservoir*, kemudian dipompa naik ke tangki air yang berada di atap bangunan. Air bersih di dalam tangki air tersebut dialirkan ke masing-masing lantai.
- *Sistem Pembuangan Air Kotor*
Air kotor yang berasal dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci dialirkan ke saluran umum kota. Sedangkan air kotor yang berasal dari kakus, dimasukkan ke dalam *septictank*. Media penyaluran air kotor tersebut berupa pipa tertutup dengan jarak terpendek dan kemiringan 0,5-1%, tanpa membuat belokan-belokan pipa yang tegak lurus.
- *Sistem Penangkal Petir*
Sistem penangkal petir menggunakan sistem sangkar *faraday* yang berupa tiang setinggi 30

cm, yang dihubungkan dengan kawat menuju *ground* dan memiliki jangkauan yang luas.

- *Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran*
Penggunaan alat pemadam kebakaran berupa *sprinkler*, *hydrant box* dan *hydrant* pilar yang diletakkan di luar bangunan, serta penyediaan jalur evakuasi berupa tangga darurat, *exhaust fan*, pintu darurat dan tanda *exit*.
- *Sistem Transportasi dalam Bangunan*
Sistem transportasi vertikal meliputi lift dan tangga. Sedangkan transportasi horizontal dalam bangunan berupa koridor.

10. KESIMPULAN

“Perancangan Kantor Gubernur Sumatera Selatan” dirancang dengan konsep penekanan desain Arsitektur Neo-Vernakular. Luasan tapak yang dipakai adalah 25000 m². Luas lantai dasar bangunan sebesar 10735 m². Penataan massa bangunan dirancang dengan pola simetris dengan garis axis yang jelas. Kantor Gubernur Sumatera Selatan merupakan gedung pemerintahan yang harus terkesan megah dan kokoh, maka dari itu konsep bentuk yang diambil adalah bentuk geometris persegi dan bentuk keseluruhan memperlihatkan bentuk yang simetris. Untuk perletakan dan orientasi bangunan didapat dari analisa tapak dan *catchment point* yang dianalisa dari arah pusat kota. Dimana bagian bangunan yang terkena garis sumbu mempunyai nilai (*value*) yang paling tinggi dan digunakan untuk kegiatan utama. Untuk atap bangunan, mengadopsi atap limas yang digunakan pada rumah adat Sumatera Selatan dengan 2 besaran sudut yang berbeda. Struktur bangunan kantor gubernur Sumatera Selatan terdiri dari *sub structure* yaitu menggunakan pondasi tiang pancang dan *upper structure* meliputi struktur rangka kaki yang terdiri dari struktur grid, struktur lantai beton, struktur rangka atap baja dengan penutup atap metal, dan struktur dinding geser (*shear wall*). Terdapat beberapa bagian bangunan yang menggunakan dilatasi.

11. DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI

- Rippen, Kennet H., *Office Space Administration*. Revised Second Edition of Office Building and Office Layout Planning, the United States of America, McGraw-Hill Book Company, 1960.
- Poerbo, Hartono, *Utilitas Bangunan*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1992.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang 2004 -2014

- BAPPEDA Kota Palembang : Rencana Detail Tata Ruang Kota Wilayah Pengembangan Kota Jakabaring
- Wiranto, *Arsitektur Vernakular Indonesia : Perannya Dalam Pengendalian Jati Diri*. Universitas Kristen Petra. (diakses tanggal 9 Maret 2012)
- Ari Siswanto, *Kearifan Lokal Arsitektur Tradisional Sumatera Selatan Bagi Pembangunan Lingkungan Binaan*, Palembang, Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik UNSRI, 2009. (diakses tanggal 11 Maret 2012)
- Denmasgino. 2011. Posted in PKN. Melalui <http://tugino230171.wordpress.com/2011/11/13/pemerintahan-provinsi/>. Diakses tanggal 17 Maret 2012.

